

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)
TAHUN 2017**



**KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Limau Sundai, 2017

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KABUPATEN : PESISIR SELATAN
OPD : KECAMATAN BATANG KAPAS
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KERJA	KET
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional yang harus dilaksanakan OPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program nasional x 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program Nasional yang dilaksanakan OPD sebanyak 3 program.	100%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Kementerian.LPNK	2	Keberadaan Standart Operating Procedure (SOP)	Ada	Apabila ada, sebutkan ada, sebanyak 18 Terdiri dari : 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Rekomendasi Cuti Pegawai 4. SOP Kenaikan Gaji Berkala PNS 5. SOP Rekomendasi naik Pangkat 6. SOP Penerbitan SPM-LS Gaji 7. SOP Penerbitan SPM-GU 8. SOP Perekaman KTP-e 9. SOP Penandatanganan Pengantar Akte Kelahiran 10. SOP Penerbitan Surat Dispensasi Pernikahan 11. SOP Penandatanganan Pengantar Kartu Keluarga 12. SOP Penerbitan Surat Pengantar Pindah 13. SOP Penandatanganan SKBD/SKBL 14. SOP Rekomendasi SITU, HO dan IMB 15. SOP Pelayanan Legalisir Dokumen 16. SOP Rekomendasi Izin Keramaian 17. SOP Penandatanganan Pengantar SKCK 18. SOP Penandatanganan Surat-Surat Surat Keterangan.	100%	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	Jumlah Perda yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3.	Jumlah Perda pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah Perda pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah perda yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100 %	- Perda pelaksanaan sebanyak 4 - Perda yang seharusnya sebanyak 6	67%	
						- Jabatan yang ada sebanyak 9 : 1. Camat		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KERJA	KET
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian Struktur jabatan	4.	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	2. Sekretaris Kecamatan 3. Kasi Pemerintahan 4. Kasi Ekonomi & Pembangunan 5. Kasi Kesejahteraan Rakyat 6. Kasi Adminduk 7. Kasi Trantibum 8. Kasubag Umum & Kepegawaian 9. Kasubag Perencanaan Keuangan & Pelaporan	100%	
			5.	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau Tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Apabila ada, sebutkan Nama Bidang / Jabatan Fungsional	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kopetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6.	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 16 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.136 orang	0.20%	
			7.	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat Diklatpim sebanyak 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	33.33%	
			8.	Pejabat yang telah memenuhi persyarat kepangkatan	Jumlah Pejabat yang telah memenuhi persyarat kepangkatan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 11 orang - Jabatan yang ada sebanyak 9 jabatan	122.22%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9.	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD : - Renstra OPD - Renja OPD - RKA OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada, sebanyak 3 jenis terdiri dari : 1. Renstra OPD 2. Renja OPD 3. RKA OPD	3 dok	
		Sinkronisasi program Renja OPD dengan program OPD	10.	Jumlah Program OPD yang tidak diakomodir dalam Renja OPD	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam Renja OPD dibagi jumlah program dalam Renja OPD yang ditetapkan pada RPJM x 100 %	- Program OPD yang tidak diakomodir dalam Renja OPD sebanyak 0 program - Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 5 program	0%	
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan program Renja OPD	11.	Jumlah program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100 %	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKA OPD sebanyak 11 program - Program RKA OPD sebanyak 11 program	100%	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KERJA	KET
		Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran	12.	Jumlah program Renja OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah program Renja OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100 %	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam DPA OPD sebanyak 11 program - Program dalam DPA OPD sebanyak 11 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi Anggaran	13.	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi Anggaran OPD dibagi total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD sebesar Rp. 1.785.517.956.- - Total Belanja APBD sebesar RP. %	 %	
		Besaran Belanja Modal	14	Belanja Modal terhadap total belanja OPD	Belanja Modal dibagi total belanja OPD dikali 100 %	- Belanja Modal OPD sebesar Rp. 74.440.000.- - Total belanja OPD sebesar RP. 1.785.517.956.-	4.17%	
		Besaran Belanja Pemeliharaan	15.	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total belanja pemeliharaan OPD sebesar Rp.33.445.000,- - Total belanja barang dan jasa sebesar RP. 545.920.000,-	6.13%	
			16.	Total belanja pemeliharaan dari total belanja OPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja OPD x 100 %	- Total belanja pemeliharaan OPD sebesar Rp.33.445.000,- - Total belanja OPD sebesar RP. 1.785.517.956.-	1.87%	
		Laporan keuangan OPD	17.	Keberadaan Laporan Keuangan OPD (Neraca CALK)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca CALK)	- Apabila ada, Laporan keuangan - Ada sebanyak 3 jenis, sbb : 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Sebanyak 3 Jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajement Asset OPD	18.	Keberadaan inventarisasi barang atau Asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau Asset OPD	Ada, Jenisnya : 1. Buku Inveteris barang 2. Kartu Inventaris ruangan 3. Rekapitulasi barang	Ada Ada Ada	
		Penggunaan Asset OPD	19.	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan tidak ada - Asset yang dikuasai OPD sebanyak 4 Asset Rp. 989.918.582.-		
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas prasarana partisipasi masyarakat	20.	Jumlah fasilitas prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Media Sosial Kecamatan	Ada Ada	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KERJA	KET
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21.	Keredaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidak ada nya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak ada	Tidak Ada	

Batang Kapas, Januari 2018
CAMAT BATANG KAPAS

ZONI ELDO, SSTP, MA
NIP. 19841008 200312 1 003

SKPD Pelaksana : Kecamatan Batang Kapas

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Rincian program dan kegiatan :

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Belanja Langsung										Tingkat Capaian (%)
		Anggaran					Realisasi					
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal	Total	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal	Total	
1	2											11
	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN											99.57
A.	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	33,900,000	180,077,350	-	-	213,977,350	33,900,000	168,254,407	-	-	202,154,407	78.63
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5,128,750			5,128,750		5,101,833			5,101,833	99.48
	2. Penyediaan Jasa Administiras Keuangan	22,650,000				22,650,000	22,650,000				22,650,000	100.00
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	11,250,000	5,606,000			16,856,000	11,250,000	5,606,000			16,856,000	100.00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor		29,008,300			29,008,300		28,961,500			28,961,500	99.84
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		6,530,000			6,530,000		4,662,320			4,662,320	71.40
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1,756,000			1,756,000		1,756,000			1,756,000	100.00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3,160,000			3,160,000		2,980,000			2,980,000	94.30
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman		29,177,500			29,177,500		25,685,000			25,685,000	88.03
	9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		37,750,000			37,750,000		35,603,054			35,603,054	94.31
	10. Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah		50,180,000			50,180,000		50,180,000			50,180,000	100.00
	11. Penunjang Operasional		11,780,800			11,780,800		7,718,700			7,718,700	65.52
B.	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	700,000	52,945,000	-	74,440,000	128,085,000	-	52,885,000	-	73,683,400	126,568,400	98.82
	12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	700,000	-		74,440,000	75,140,000		-		73,683,400	73,683,400	98.06
	13. Pemeliharaan Rutin Berkala/Rumah Dinas		6,500,000			6,500,000		6,500,000			6,500,000	100.00
	14. Pe meliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		27,000,000			27,000,000		27,000,000			27,000,000	100.00
	15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional		17,745,000			17,745,000		17,685,000			17,685,000	
	16. Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor		1,700,000			1,700,000		1,700,000			1,700,000	
C.	PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-	5,600,000	-	-	5,600,000	56.00
	17. Pendidikan dan Pelatihan Formal		10,000,000			10,000,000		5,600,000			5,600,000	56.00
D.	PROG. PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMI	-	9,311,500	-	-	9,311,500	-	9,287,500	-	-	9,287,500	99.74
	18. Fasilitasi Masalh Trantib dan Pertanahan		9,311,500			9,311,500		9,287,500			9,287,500	99.74
E.	PROG. PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	-	22,637,500	-	-	22,637,500	-	22,225,000	-	-	22,225,000	98.18
	19. Pelaksanaan Upacara HUT RI		22,637,500			22,637,500		22,225,000			22,225,000	98.18
F.	PROG. PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	3,600,000	7,254,000	-	-	10,854,000	3,600,000	7,219,000	-	-	10,819,000	99.68
	20. Distribusi Raskin	3,600,000	7,254,000			10,854,000	3,600,000	7,219,000			10,819,000	99.68
G.	PROG. PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	9,928,650	-	-	9,928,650	-	9,823,600	-	-	9,823,600	98.94
	21. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan		9,928,650			9,928,650		9,823,600			9,823,600	98.94
H.	PROG. PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	-	4,615,000	-	-	4,615,000	-	4,580,000	-	-	4,580,000	99.24
	22. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Keagamaan dan Kemasyarakatan		4,615,000			4,615,000		4,580,000			4,580,000	99.24

I.	PROG. PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA	-	11,552,000	-	-	11,552,000	-	11,552,000	-	-	11,552,000	100.00
	23. Pagelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah Pada Festival Langkisau		7,302,000			7,302,000		7,302,000			7,302,000	100.00
	24. Penunjang Pariwisata Sungai Bungin		4,250,000			4,250,000		4,250,000			4,250,000	
J.	PROG. PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NAGARI	2,100,000	17,919,000	-	-	20,019,000	2,100,000	17,840,750	-	-	19,940,750	99.61
	25. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari		11,683,000			11,683,000		11,604,750			11,604,750	99.33
	26. Verifikasi Dan Evaluasi APB Nagari	2,100,000	6,236,000			8,336,000	2,100,000	6,236,000			8,336,000	
K.	PROG. PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN	12,600,000	92,340,000	-	-	104,940,000	12,450,000	88,202,250	-	-	100,652,250	95.91
	27. Pembinaan PKK Kecamatan		60,334,750			60,334,750		56,282,000			56,282,000	93.28
	28. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong		8,185,500			8,185,500		8,180,500			8,180,500	99.94
	29. Perencanaan Pembangunan Kecamatan		11,596,250			11,596,250		11,576,250			11,576,250	99.83
	30. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan		6,967,500			6,967,500		6,967,500			6,967,500	100.00
	31. Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	12,600,000	5,256,000			17,856,000	12,450,000	5,196,000			17,646,000	98.82
J U M L A H		52,900,000	418,580,000	-	74,440,000	545,920,000	52,050,000	392,889,507	-	73,683,400	523,202,907	95.84

B. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

- Masih kurang tepatnya dalam perencanaan keuangan sehingga anggaran tidak terserap maksimal. Ini disebabkan karena adanya perubahan-perubahan sesuai dengan berjalannya waktu pelaksanaan

2. Solusi :

- Perlunya perencanaan yang terarah dan terukur, dalam perencanaan penganggaran, sehingga target bulanan dapat tercapai secara maksimal

C. Hal-hal yang perlu dilaporkan :

-

D. REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA DAN REALISASI TAHUN 2017

No	SKPD /URUSAN	ANGGARAN					REALISASI				
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	JUMLAH	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	JUMLAH
1.	KECAMATAN BATANG KAPAS										
a.	Otonomi Daerah	52,900,000	418,580,000	-	74,440,000	545,920,000	52,050,000	392,889,507	-	73,683,400	523,202,907
Total		52,900,000	418,580,000	-	74,440,000	545,920,000	52,050,000	392,889,507	-	73,683,400	523,202,907

Limau Sundai, Januari 2018
CAMAT BATANG KAPAS

ZONI ELDO. SSTP, MA
NIP. 19841008 200312 1 003

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KANTOR KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
PER 31 DESEMBER 2017

NO	NAMA / NIP	GOLONGAN	JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN TERAKHIR							JENIS KELAMIN		GOLONGAN/PANGKAT			
			NAMA JABATAN	STRUKTURAL	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV
1.	WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si NIP. 19831019 200112 1 003	IV/A	CAMAT	ESELON III	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-
2.	ZAINIL, S.Pt NIP.19630524 198603 1 004	IV/A	SEKRETARIS KECAMATAN	ESELON III	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓
3.	JAYA YUMSI, S.Kom NIP. 19700828 200701 2 005	III/C	KASI PEM	ESELON IV	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-
4.	DASROL, SH NIP. 19620720 198602 1 003	III/D	KASI KESOS	ESELON IV	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-
5.	RAJA RATMAN, SE NIP. 19721027 200012 1 002	III/C	KASI PME	ESELON IV	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-
6.	SYAMSI KASIAN NIP. 19640915 198603 1 005	III/C	KASI PELAYANAN	ESELON IV	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-
7.	SYAWALLUDIN,SH NIP. 19670415 198703 1 005	III/D	KASI TRANTIBUM	ESELON IV	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-
8.	ROZA ADELINA, SH NIP. 19840615 200501 2 006	III/B	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	ESELON IV	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-
9.	YOGGI HARMAIDI, S.IP NIP. 19930302 201507 1 002	III/B	KASUBBAG PERENC, KEU & PEL	ESELON IV	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-
10.	JAMURIS, S.Sos NIP. 19700820 200701 1 001	III/A	FUNGSIONAL UMUM	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-
11.	YULNITASASRIATI, S.IP NIP. 19720708 200701 2 005	III/A	BENDAHARA	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-
12.	SYAFRAN, SH NIP. 19610909 198203 1 007	III/D	WALI NAGARI	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-
13.	BEN SUHANDRI, SH NIP. 19720418 199203 1 001	III/C	WALI NAGARI	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-
14.	ULIL AMRI, S.Sos NIP. 19641220 201407 1 00	III/A	STAFF	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-
15.	YULMALIZAR NIP. 19641220 198602 2 001	III/C	SEKRETARIS NAGARI	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-
16.	LASDI PRASASTI NIP. 19851105 200801 1 002	II/C	SEKRETARIS NAGARI	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-
	TOTAL					3	-	-	-	12	1	13	3	-	1	14	1

CAMA1

WENDRA F

NIP. 1983

PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			
PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
-	-	-	✓
-	-	-	✓
-	-	-	✓
-	-	-	✓
-	-	-	✓
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	✓
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	6

└ BATANG KAPAS,

ROVIKTO, SSTP, M.Si

31019 200112 1 003